KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Deal Politik di Balik Jalan Puan Pimpin DPR
Tanggal : Kamis, 03 Oktober 2024
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 4

"Deal" Politik di Balik Jalan Puan Pimpin DPR

Niat merevisi UU MD3 tak berwujud. Jalan mulus pun terbentang bagi Puan Maharani untuk kembali memimpin DPR. Ada apa di balik itu?

Tok..! Pimpinan sementara DPR Zulfikar Achmad mengetuk palu tanda kesepakatan mengenai pimpinan DPR periode 2024-2029 disahkan. Puan Maharani resmi ditetapkan kembali menjadi Ketua DPR bersama Sufmi Dasco Ahmad, Adies Kadir, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa sebagai wakilnya. Tak ada protes yang berarti, apalagi gejolak seperti yang sebelumnya terjadi saat pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Rapat paripurna pemilihan pimpinan DPR yang digelar Selasa (1/10/2024) juga berlangsung kurang dari dua jam. Sebanyak 580 anggota DPR dari delapan fraksi partai politik (parpol) yang baru beberapa jam dilantik setuju dengan usulan nama pimpinan DPR yang sebelumnya disepakati dalam rapat konsultasi.

Rapat konsultasi antara pimpinan parlemen sementara dan perwakilan parpol untuk membahas usulan calon pimpinan DPR periode 2024-2029 juga tuntas tak kurang dari satu jam. Dalam rapat di Ruang Pansus B Gedung Nusantara II itu lima fraksi pemilik kursi terbanyak mengusulkan nama calon pimpinan.

"Kami tadi sudah musyawarahkan dengan baik. Dan, karena sampai sekarang tidak ada perubahan Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD), jelas bahwa lima pemenang Pemilu 2024 menjadi pimpinan DPR," kata Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji ditemui seusai rapat konsultasi.

Sarmuji tidak menyangkal, tiadanya perubahan UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang MD3 mempercepat tahap penetapan pimpinan DPR. Tak ada yang perlu diperdebatkan karena semua tinggal mengikuti ketentuan yang ada di beleid tersebut.

Dalam UU MD3 diatur bahwa pimpinan DPR terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Posisi tersebut diisi oleh anggota DPR terpilih dari partai peraih kursi terbanyak di pemilu secara berturut-turut.

Berdasarkan hasil Pemilu 2024, suara dan kursi terbanyak di DPR diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

PDI-P mengajukan Puan Maharani untuk kembali menjadi ketua DPR setelah menduduki posisi yang sama pada periode 2019-2024. Sementara untuk mengisi kursi wakil ketua DPR, Golkar mengajukan Adies Kadir, Gerindra memajukan Sufmi Dasco Ahmad, Nasdem mengusulkan Saan Mustopa, dan PKB mengajukan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Mulusnya pemilihan pimpinan DPR ini mengulang proses pemilihan yang terjadi di awal DPR periode 2019-2024. Saat itu, mekanisme penentuan pimpinan pun diserahkan kepada partai peraih kursi terbanyak di pemilu secara berturut-turut sesuai dengan UU MD3. Dengan aturan itu, kisruh seperti yang terjadi di awal DPR periode 2014-2019 bisa dicegah.

Tidak adanya perubahan UU MD3 jelang penentuan pimpinan DPR 2024-2029, kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, tidak terlepas dari komunikasi antarfraksi parpol di DPR yang kembali lolos ke parlemen setidaknya dalam dua bulan terakhir. Dari sembilan fraksi parpol di DPR periode 2019-2024, hanya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang tak lolos ambang batas parlemen. Dalam komunikasi tersebut DPR sepakat akan solid, tidak terpecah kendati mereka berasal dari parpol yang berbeda. "Katakanlah ya, dulu, kan, ada istilahnya kubu-kubu. Kalau sekarang enggak ada," tuturnya.

Padahal, sebelumnya, wacana untuk merevisi UU MD3 sempat berembus. Bahkan, pada April lalu, RUU MD3 sempat masuk ke daftar Program Legislasi Nasional Prioritas 2024.

Kompromi politik

Ditemui di sela-sela penetapan pimpinan DPR, politisi senior Partai Golkar Firman Soebagyo mengakui bahwa kesepakatan untuk tidak mengubah UU MD3 diiringi dengan kompromi politik antarfraksi di DPR. Ia pun tidak menyangkal, cakupan kompromi tidak hanya terkait dengan pembagian peran di parlemen, tetapi juga di pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto, presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra.

Meski tak mau menyebutkan hasil kompromi yang dimaksud, ia menegaskan bahwa ada kepentingan lebih besar yang sudah disepakati Golkar dengan parpol-parpol lain. "Kita harus melihat kepentingan yang lebih besar. Mungkin itu (yang jadi) pertimbangan," ujarnya.

Sekalipun merupakan parpol pemenang kedua Pemilu 2024, Golkar saat ini baru mendapatkan posisi sebagai wakil ketua DPR. Dalam tradisi DPR, partai pemenang kedua pemilu bakal mendapatkan kursi ketua MPR karena pemenang pemilu mendapatkan kursi ketua DPR. Hal itu terjadi pada periode lalu, posisi ketua MPR dijabat oleh politisi senior Partai Golkar, Bambang Soesatyo.

Akan tetapi, pada periode 2024-2029, besar kemungkinan kursi ketua MPR diserahkan kepada Gerindra. Prabowo Subianto dikabarkan sudah menugasi Sekjen Gerindra Ahmad Muzani untuk menduduki kursi ketua MPR.

Sejumlah politisi di parlemen mengungkapkan, untuk menggantikan peran yang berkurang di parlemen, Golkar akan mendapatkan lima kursi menteri di kabinet Prabowo.

Kompromi tak hanya terjadi pada Golkar, tetapi juga PDI-P, satu-satunya parpol di parlemen yang belum menyatakan dukungan kepada pemerintahan Prabowo. Anggota Fraksi PDI-P DPR, Utut Adianto, mengakui, kompromi itu terlihat dari mulusnya pemilihan Puan sebagai ketua DPR. Dukungan tujuh parpol parlemen untuk tetap memilih Puan menunjukkan upaya membangun persahabatan meski mereka berbeda sikap dengan PDI-P pada Pilpres 2024. "Artinya, di sini sedang dikembangkan persahabatan, sedang dikembangkan titik-titik kerja sama, sedang diupayakan separsial mungkin kompromi terbaik itu yang mana," tuturnya.

Sekalipun tak mau menyebut soal bentuk kompromi, Utut menegaskan, PDI-P juga akan mengubah gaya berpolitiknya di DPR. Ia memperkirakan, partainya akan memperhalus cara menyampaikan kritik dan menghindari langkah yang bisa mempermalukan seseorang. Perubahan gaya itu bukan masalah, asalkan substansi kritik tetap tersampaikan.

"Kalau kritis mungkin, (tetapi) enggak setajam dulu," kata Utut.

Mulusnya jalan Puan kembali menduduki kursi ketua DPR ini pun terjadi di tengah berembusnya rencana pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo. Berulang kali sebelum digelar penentuan pimpinan DPR 2024-2029, Puan telah menyampaikan ibunya bakal bertemu Prabowo meski hingga kini belum jelas apakah pertemuan itu akan terwujud atau tidak.

Kini, dengan Gerindra—bersama tujuh parpol lain di DPR yang telah masuk dalam gerbong koalisi pendukung pemerintahan Prabowo kelak—menyokong Puan menjadi ketua DPR lagi, apakah kompromi-nya akan memuluskan terwujudnya pertemuan Prabowo dengan Megawati? Atau bahkan bisa lebih jauh, tak sekadar pertemuan, Megawati membawa PDI-P ikut masuk dalam gerbong koalisi parpol pendukung pemerintahan Prabowo? Kita tunggu.

(KURNIA YUNITA RAHAYU/ NIKOLAUS HARBOWO)